

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Periode 2008-2018

Author

Wipayani Pawelloi¹, Baharuddin Semmaila², Dahliah³

Email

atayarasya38@gmail.com¹, baharuddin.semmaila@umi.ac.id², dahliah.dahliah@umi.ac.id³

Afiliasi

Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia¹, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3}

Abstrak: Penelitian ini dilakukan bertujuan: (1) Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018. (2) Mengetahui Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui data BPS dengan 10 periode yakni dari tahun 2008-2018, survei dilakukan pada bulan September- Oktober 2020. Data di analisis dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan pengumpulan data dilakukan di BPS Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, penelitian dilakukan dari bulan September-Oktober 2020. Data di analisis menggunakan program SPSS 20 dengan metode pengolahan data yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018. (2) PDRB tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018. Hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018, namun berbanding terbalik terhadap PDRB yang tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 2012).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Menurut (sumitro, 2014) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan

harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (sukirno, 2010). Hal ini dapat menyebabkan terdapat daerah yang maju dan juga tertinggal, tergantung dari potensi yang dimiliki di daerahnya tersebut dan bagaimana mengelola potensi tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, dapat dihitung oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang maupun jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di suatu daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu (Fisanti, 2013).

Menurut (Todaro, 2015) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.

Menurut Kuncoro (2012) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber- sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal, 2011).

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh

untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Tabel 1. PAD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018

Tahun	PAD Kabupaten Majene (dalam juta rupiah)
2008	214.237.561
2009	276.955.439
2010	339.711.567
2011	448.765.112
2012	611.823.998
2013	829.898.110
2014	872.674.394
2015	882.109.432
2016	819.973.804
2017	902.652.851
2018	918.819.561

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2020

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan Barat Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah menghasilkan 214.237.561, di Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan cukup pesat 276.955.439, dan terus berlanjut di tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 339.711.567, di tahun 2011 sebesar 448.765.112, di tahun 2012 meningkat sebesar 611.823.998, dan di tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 829.898.110, di tahun 2014 sebesar 872.674.394, di tahun 2015 882.109.432, di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 819.973.804, di tahun 2017 sebesar 902.652.851, dan di tahun 2018 terus meningkat sebesar 918.819.561, peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan daerah dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan asli daerahnya, ukuran yang digunakan untuk menentukan tolok ukur ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada faktor Pengeluaran pemerintah dan PDRB yang tentunya berpengaruh terhadap PAD, dalam hal ini

bersumber dari pajak dan keuntungan produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah serta pegadaian.

Melihat pembangunan ekonomi Kabupaten Majene telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan karna diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang, tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, tempat wisata, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong investor dalam membangun usahanya di Kabupaten Majene melalui sector unggulan PDRB yang sebagai salah satu factor pengaruh PAD.

Kontribusi besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sector-sektor unggulan seperti sector perdagangan, restoran dan hotel, dan sector industry yang membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah terutama memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dampak positif dari kebijakan proyek-proyek yang didanai atas prioritas dari Pemerintah Pusat yang selama ini diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena empiris berdasarkan data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majene, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene. Waktu penelitian dilakukan selama 1 (Satu) bulan lamanya pada bulan September 2020.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif merupakan data Time Series dari tahun 2008-2018. Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Produk Regional Rasio Bruto (PDRB) yang didapat dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi di mana metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang didapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan: Uji Regresi linier berganda, Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis, dan Uji Asumsi Klasik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh mengenai pengeluaran pemerintah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2008-2018**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Majene (dalam juta rupiah)
2008	214.237.561
2009	225.167.197
2010	281.174.320
2011	429.711.084
2012	711.009.438
2013	859.090.214
2014	870.547.775
2015	870.547.775
2016	710.995.218
2017	891.190.543
2018	878.969.055

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2020

Dari data yang diperoleh mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. PDRB Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018

Tahun	PDRB Kabupaten Majene (dalam juta rupiah)
2008	172.403
2009	177.547
2010	218.743
2011	288.612
2012	318.244
2013	318.250
2014	348.347
2015	380.099
2016	419.398
2017	461.349
2018	461.839

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2020

Dari data yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. PAD Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018

Tahun	PAD Kabupaten Majene (dalam juta rupiah)
2008	214.237.561
2009	276.955.439
2010	339.711.567
2011	448.765.112
2012	611.823.998
2013	829.898.110
2014	872.674.394
2015	882.109.432
2016	819.973.804
2017	902.652.851
2018	918.819.561

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2020

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini akan di bahas dua hal pokok yaitu pengaruh secara parsial dan simultan pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Majene Provnsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018.

- ❖ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018.

Hasil menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Majene adalah wilayah pembangunan yang tentu saja yang di arahkan dengan upaya-upaya pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan secara efisien dan daya guna, tentusaja itu erlu pembiayaan / pengeluaran pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Menurut Suparmoko (2012 :57) sesuai dengan pengklasifikasian pengeluaran pemerintah, pertama pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dengan sasaran pajak yang lain dengan akhirnya akan menaikan penerimaan pemerintah, misalnya, pemerintah menaikan pajak reprodif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua adalah pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian sejalan dengan yang di lakukan oleh Menurut M Mayza (2015) di mana di temukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- ❖ Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap PAD di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2018.

Hasil menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Dari teori yang di kemukakan oleh Menurut (sadono sukirno,2017) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan RMBE Putri (2018) dan Menurut N Priyono (2016), yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesimpulan

Di mana Pendapatan Asli Daerah menurut UU no 30 tahun 2014 adalah pendapatan yang di peroleh yang di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang

undangan. PAD = pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan + lain lain PAD yang sah.

Sedangkan pengeluaran pemerintah adalah jenis output pemerintah dikurangi output untuk pembentukan modal sendiri di kurangi penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan atau tidak signifikan secara ekonomi).

Adapun pengeluaran pemerintah di lihat dari = belanja modal + belanja tanah + belanja peralatan dan mesin +belanja gedung dan bangunan +belanja jalan, irigasi dan jaringan + serta belanja aset lainnya.

Dengan demikian di simpulkan hasil penelitian yang telah di lakukan yakni: Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Artinya pengeluaran Pemerintah memberikan dampak yang positif serta pengeluaran pemerintah mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dengan sasaran pajak yang lain dengan akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah, misalnya, pemerintah menaikkan pajak repositif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

PDRB tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Di Kabupaten Majene tidak memberikan dampak yang positif Di mana peningkatan PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Di lihat dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Saran

Dengan temuan penelitian di atas hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, terus meningkatkan pengeluaran pemerintah di beberapa sektor agar menunjang aktivitas sektoral sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Di harapkan pemerintah memperhatikan beberapa aspek yang menjadi indikator pengeluaran pemerintah, contohnya dari Sektor Kesehatan, Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan agar dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah secara optimal.

Di harapkan pemerintah memperhatikan berbagai sumber yang dapat meningkatkan PDRB serta meningkatkan kemampuan sumber daya Manusia agar dapat bekerja optimal untuk meningkatkan PDRB karena salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Di amana semakin tinggi PDRB maka secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga PAD juga mengalami peningkatan.

Referensi

- Adiatmojo Dwi Gatot. "Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin," Jakarta, 2010
- Atep Adya Barata." Pendapatan asli daerah." terjemahkan Barata, jakarta 2010
- Aldefer,1964." Keuangan pemerintah daerah". Jakarta: Rajawali Azis, 2012. "Pendapatan Asli Daerah" Jakarta: Erlangga
- Bastian, 2013. "Pendapatan Asli Daerah". Jakarta
- Brata.2010."Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". Jakarta
- Bappenas.2003." PAD terhadap PDRB". Jakarta: Erlangga BPS.2003." pengertian PDRB". Sul-Bar
- Davey," perpajakan daerah". Terjemahan Amarullah. Jakarta.2012
- Damodar Gujarati, 1995. Ekonometrika Dasar, terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta

- Elita, 2015.” Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” Rajawali Fisanti, 2013
- Geodhart, C, “Garis-Garis Besar Keuangan Negara”, Terjemahan Ratmoko, Jakarta, Jambatan, 1982
- Koswara,2017.”komponen pendapatan asli daerah”. Yogyakarta. Kuncoro,2012.” Otonomi daerah”. Jakarta: fokusmedia
- Kurniawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 1993 – 2006
- NN, 2012, “Pendapatan Asli Daerah” Erlangga. Sibotong, F. Santoso, & Iskandar, 2015
- Soemitro rochmat, “ pajak daerah”. Terjemahan Geodhart, Jakarta, 2014 Saberan.H, 2011.”Produk Domestik Regional Bruto”. Jakarta: Rajawali Sumitro, 2014.” pertumbuhan pembangunan ekonomi”. Jakarta: Balai Pustaka
- Sukirno,2010.”pertumbuhan ekonomi”Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Sutrisno 2008,” Konsep Pendapatan Asli Daerah” Rajawali Syamsi,1998.”Pendapatan asli daerah (PAD)”’. Erlangga, Jakarta Smeet,”pajak daerah”. Terjemahan Geodhart, Jakarta, 2012
- Sodargo R. “Retribusi Daerah”Terjemahan Geodhart, Jakarta, 2010 Suparmoko, 2008.”Pengeluaran Pemerintah”. Erlangga
- Supriatna Tjahya.”Perusahaan Daerah”. 2014
- Undang-undang No.32 tahun 2004, “Undang-undang Otonomi Daerah”, Jakarta, Fokusmedia, 2004
- Uppal, 2011.”keuangan pusat dan daerah”. Jakarta: erlangga
- Prawiroharjo sutrisno.” Retribusi daerah” Terjemahan Geodhart, Jakarta, 2012
- Pratiwi, 2014.” Proposi pendapatan asli daerah”. Rajawali Todaro, 2015.” Pertumbuhan ekonomi”. Jakarta
- Wahidi,” faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan timur” KAL-TIM, 2003
- Widjaja,2012.” Pendapatan asli daerah”Jakarta: UI